TUJUAN (POKIN LEVEL 1)	**Menurunnya Risiko Bencana Daerah**									
INDIKATOR TUJUAN (POKIN LEVEL 1)	Indeks Resiko Bencana									
SASARAN (POKIN LEVEL 2)	Meningkatnya kemampuan wilayah dalam menghadapi ancaman bencana									
INDIKATOR SASARAN (POKIN LEVEL 2)	Persentase wilayah rawan bencana yang memiliki kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana									
PROGRAM (SIPD)	1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
SASARAN PROGRAM (POKIN LEVEL 3)	1.1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah									
INDIKATOR PROGRAM (POKIN LEVEL 3)	Rerata Persentase Capaian Kinerja Program									
KEGIATAN (SIPD)	1.1 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	1.2. ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.3 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	1.4 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH						
SASARAN KEGIATAN (POKIN LEVEL 4)	1.1.1 Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.1.2 Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Keuangan	1.1.3 Tersusunnya Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	1.1.4 Tersusunnya Laporan Penyediaan Barang dan Jasa						
INDIKATOR KEGIATAN (POKIN LEVEL 4)	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan	Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa						
SUBKEGIATAN (SIPD)	1.1.1.1 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	1.1.2.1 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.1.3.1 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	1.1.4.1 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	1.1.5.1 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	1.1.6.1 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	1.1.7.1 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	1.1.8.1 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	1.1.9.1 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	1.1.10.1 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD
SASARAN SUBKEGIATAN (SIPD)	Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN secara tepat waktu	Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas dan atribut kelengkapan ASN	Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor untuk mendukung kelancaran operasional Perangkat Daerah	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor sesuai kebutuhan untuk menunjang pelaksanaan tugas Perangkat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga untuk mendukung kebersihan, kenyamanan, dan kelancaran operasional Perangkat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan bahan logistik kantor untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan operasional Perangkat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan untuk mendukung kelancaran administrasi dan operasional Perangkat Daerah	Terlaksananya ketersediaan bahan bacaan dan informasi peraturan perundang-undangan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD secara efektif untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah
INDIKATOR SUBKEGIATAN (SIPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

TUJUAN (POKIN LEVEL 1)									
INDIKATOR TUJUAN (POKIN LEVEL 1)									
SASARAN (POKIN LEVEL 2)									
INDIKATOR SASARAN (POKIN LEVEL 2)									
PROGRAM (SIPD)									
SASARAN PROGRAM (POKIN LEVEL 3)									
INDIKATOR PROGRAM (POKIN LEVEL 3)									
KEGIATAN (SIPD)		1.5. PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH			1.6 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		1.7 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		
SASARAN KEGIATAN (POKIN LEVEL 4)		1.1.5 Meningkatnya ketersediaan Barang Milik Daerah yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah			1.1.6 Meningkatnya ketersediaan jasa penunjang untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah		1.1.7 Meningkatnya kondisi dan kesiapan Barang Milik Daerah dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah		
INDIKATOR KEGIATAN (POKIN LEVEL 4)		Jumlah Laporan Pengadaan Sarana dan Prasarana			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Aset yang Dipelihara		
SUBKEGIATAN (SIPD)	1.1.11.1 DUKUNGAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA SKPD	1.1.12.1 PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	1.1.13.1 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	1.1.14.1 PENGADAAN GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	1.1.15.1 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	1.1.16.1 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	1.1.17.1 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK, DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	1.1.18.1 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	1.1.19.1 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA
SASARAN SUBKEGIATAN (SIPD)	Terlaksananya dukungan SPBE untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan serta administrasi Perangkat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan kendaraan dinas operasional/lapangan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan pelayanan Perangkat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan mesin untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan gedung kantor atau bangunan lainnya yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, air, dan listrik untuk mendukung kelancaran operasional Perangkat Daerah.	Terpenuhinya kebutuhan jasa pelayanan umum kantor dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional/lapangan dalam kondisi layak, aman, dan siap digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan pelayanan Perangkat Daerah	Terpeliharanya peralatan dan mesin dalam kondisi baik dan siap digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Terpeliharanya dan meningkatnya kelayakan gedung kantor serta bangunan lainnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Perangkat Daerah
INDIKATOR SUBKEGIATAN (SIPD)	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

TUJUAN (POKIN LEVEL 1)										
INDIKATOR TUJUAN (POKIN LEVEL 1)										
SASARAN (POKIN LEVEL 2)										
INDIKATOR SASARAN (POKIN LEVEL 2)										
PROGRAM (SIPD)	2. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA									
SASARAN PROGRAM (POKIN LEVEL 3)	2.1 Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pengurangan risiko bencana		2.2 Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana							
INDIKATOR PROGRAM (POKIN LEVEL 3)	Persentase masyarakat yang memiliki pengetahuan dalam pengurangan risiko bencana		Persentase masyarakat yang memiliki kemampuan kesiapsiagaan bencana							
KEGIATAN (SIPD)	2.1 PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA KABUPATEN/KOTA		2.2 PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA							
SASARAN KEGIATAN (POKIN LEVEL 4)	2.1.1 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengurangan risiko bencana		2.2.1 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana							
INDIKATOR KEGIATAN (POKIN LEVEL 4)	Persentase masyarakat yang memperoleh fasilitasi sosialisasi dan pelatihan pencegahan dan pengurangan risiko bencana		Persentase masyarakat yang memperoleh fasilitasi kesiapsiagaan bencana							
SUBKEGIATAN (SIPD)	2.1.1.1 SOSIALISASI, KOMUNIKASI, INFORMASI dan EDUKASI (KIE) RAWAN BENCANA KABUPATEN/KOTA (PER JENIS ANCAMAN BENCANA)	2.1.2.1 PENYUSUNAN KAJIAN RISIKO BENCANA KABUPATEN/KOTA	2.1.3.1 PENGELOLAAN RISIKO BENCANA KABUPATEN/KOTA	2.1.4.1 PENYEDIAAN PERALATAN PERLINDUNGAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA	2.1.5.1 GLADI KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA KABUPATEN/KOTA	2.1.6.1 PELATIHAN KELUARGA TANGGAP BENCANA ALAM	2.1.7.1 PENGUATAN KAPASITAS KAWASAN UNTUK PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN BENCANA	2.1.8.1 PENGEMBANGAN KAPASITAS TIM REAKSI CEPAT (TRC) BENCANA KABUPATEN/KOTA	2.1.9.1 PENYUSUNAN RENCANA KONTIJENSI KABUPATEN/KOTA	2.1.10.1 PENYUSUNAN RENCANA PENANGGULANGAN KEDARURATAN BENCANA
SASARAN SUBKEGIATAN (SIPD)	Terlaksananya Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) di Daerah Rawan Bencana	Tersusunnya dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengelolaan risiko bencana melalui kegiatan pengurangan risiko, peningkatan kapasitas, dan kesiapsiagaan masyarakat serta pemerintah daerah	Tersedianya peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan bencana sesuai kebutuhan dan standar untuk mendukung penanggulangan bencana	Terlaksananya gladi kesiapsiagaan bencana untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan masyarakat	Terlaksananya pelatihan keluarga tanggap bencana untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesiapsiagaan keluarga dalam menghadapi bencana alam	Meningkatnya kapasitas kawasan dan masyarakat dalam melakukan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Meningkatnya kompetensi, kesiapsiagaan, dan kemampuan operasional Tim Reaksi Cepat (TRC) dalam penanganan darurat bencana	Terlaksananya Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana
INDIKATOR SUBKEGIATAN (SIPD)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (perjenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun

TUJUAN (POKIN LEVEL 1)										
INDIKATOR TUJUAN (POKIN LEVEL 1)										
SASARAN (POKIN LEVEL 2)				Meningkatnya penanganan darurat bencana						
INDIKATOR SASARAN (POKIN LEVEL 2)				Persentase kejadian bencana yang memperoleh penanganan darurat						
PROGRAM (SIPD)										
SASARAN PROGRAM (POKIN LEVEL 3)			2.3 Meningkatnya Kualitas Sistem Informasi dan Komunikasi Kebencanaan							
INDIKATOR PROGRAM (POKIN LEVEL 3)			Persentase sistem informasi dan komunikasi kebencanaan yang berfungsi dengan baik							
KEGIATAN (SIPD)										2.3 PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA
SASARAN KEGIATAN (POKIN LEVEL 4)			2.2.2 Meningkatnya pengelolaan informasi dan komunikasi kebencanaan							2.3.1 Meningkatnya kapasitas SDM penanganan darurat bencana
INDIKATOR KEGIATAN (POKIN LEVEL 4)			Jumlah sistem informasi dan komunikasi kebencanaan yang berfungsi optimal							Persentase anggota TRC yang memiliki sertifikat pelatihan peningkatan kapasitas penanganan darurat bencana
SUBKEGIATAN (SIPD)	2.1.11.1 PENGENDALIAN OPERASI DAN PENYEDIAAN SARANA PRASARANA KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA KABUPATEN/KOTA	2.1.12.1 PENYUSUNAN RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN/KOTA	2.1.13.1 PELATIHAN PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA KABUPATEN/KOTA	2.1.14.1. RESPON CEPAT KEJADIAN LUAR BIASA PENYAKIT/WABAH OONOSIS PRIORITAS	2.1.15.1 RESPON CEPAT DARURAT BENCANA KABUPATEN/KOTA	2.1.16.1 PENCARIAN, PERTOLONGAN, DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA KABUPATEN/KOTA	2.1.17.1 PENYUSUNAN RENCANA OPERASI KEDARURATAN BENCANA KABUPATEN/KOTA	2.1.18.1 PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR DALAM PENANGANAN KEADAAN DARURAT KABUPATEN/KOTA	2.1.19.1 PENYEDIAAN LOGISTIK PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA KORBAN/KOTA	2.1.20.1 RESPON CEPAT BENCANA NON ALAM EPIDEMI/WABAH PENYAKIT
SASARAN SUBKEGIATAN (SIPD)	Terlaksananya Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Terlaksananya Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencarian, Pertolongan, dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Terlaksananaya Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit
INDIKATOR SUBKEGIATAN (SIPD)	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu

TUJUAN (POKIN LEVEL 1)								
INDIKATOR TUJUAN (POKIN LEVEL 1)								
SASARAN (POKIN LEVEL 2)								
INDIKATOR SASARAN (POKIN LEVEL 2)								
PROGRAM (SIPD)								
SASARAN PROGRAM (POKIN LEVEL 3)			2.4 Meningkatnya kualitas evakuasi dan penyelamatan korban bencana					
INDIKATOR PROGRAM (POKIN LEVEL 3)			Persentase korban bencana yang berhasil dievakuasi dan diselamatkan					
KEGIATAN (SIPD)								
SASARAN KEGIATAN (POKIN LEVEL 4)		2.3.2 Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar bencana				2.3.3 Meningkatnya kesiapan sarana dan prasarana penanganan darurat bencana		
INDIKATOR KEGIATAN (POKIN LEVEL 4)		Jumlah warga yang terlayani logistik kebutuhan dasar bencana				Jumlah sarana dan prasarana penanganan darurat bencana yang siap digunakan		
SUBKEGIATAN (SIPD)	2.1.21.1 AKTIVASI SISTEM KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA	2.1.22.1 PENYUSUNAN REGULASI PENANGGULAN BENCANA KABUPATEN/KOTA	2.1.23.1 KERJA SAMA ANTAR LEMBAGA DAN KEMITRAAN DALAM PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN/KOTA	2.1.24.1 PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI KEBENCANAAN	2.1.25.1 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA	2.1.26.1 PENINGKATAN KAPASITAS SDM APARATUR PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN/KOTA	2.1..27.1 BIMBINGAN TEKNIS PASCA BENCANA KABUPATEN/KOTA	2.1.28.1 KOORDINASI PENANGANAN PASCABENCANA KABUPATEN/KOTA
SASARAN SUBKEGIATAN (SIPD)	Terlaksananya Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Terlaksananya Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
INDIKATOR SUBKEGIATAN (SIPD)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan

TUJUAN (POKIN LEVEL 1)					
INDIKATOR TUJUAN (POKIN LEVEL 1)					
SASARAN (POKIN LEVEL 2)	Meningkatnya pemulihan pascabencana				
INDIKATOR SASARAN (POKIN LEVEL 2)	Persentase rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang terselesaikan				
PROGRAM (SIPD)					
SASARAN PROGRAM (POKIN LEVEL 3)	2.5 Meningkatnya rehabilitasi sarana dan prasarana terdampak bencana				
INDIKATOR PROGRAM (POKIN LEVEL 3)	Persentase sarana dan prasarana terdampak yang telah direhabilitasi				
KEGIATAN (SIPD)	2.4 PENATAAN SISTEM DASAR PENANGGULANGAN BENCANA				
SASARAN KEGIATAN (POKIN LEVEL 4)	2.4.1 Meningkatnya identifikasi dan pendataan object terdampak bencana				
INDIKATOR KEGIATAN (POKIN LEVEL 4)	Persentase objek terdampak bencana yang terdata				
SUBKEGIATAN (SIPD)	2.1.29.1 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA DALAM PENANGANAN PASCABENCANA KABUPATEN/KOTA	2.1.30.1 FASILITASI PENGUMPULAN DATA PENDUDUK DI DAERAH RAWAN BENCANA LINTAS KABUPATEN/KOTA	2.1.31.1 PENGUATAN KELEMBAGAAN BENCANA KABUPATEN/KOTA	2.1.32.1 PENYUSUNAN KAJIAN KEBUTUHAN PASCABENCANA (JITUPASNA) DAN RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA (R3P) KABUPATEN/KOTA	2.1.33.1 PENYUSUNAN RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) SUB URUSAN BENCANA KABUPATEN/KOTA
SASARAN SUBKEGIATAN (SIPD)	Terlaksananya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Dunia Usaha Dalam Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Fasilitasi Pengumpulan Data Penduduk di Daerah Rawan Bencana Lintas Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota
INDIKATOR SUBKEGIATAN (SIPD)	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal	Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana	Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun